

PENGARUH KEPADATAN PENDUDUK TERHADAP TINDAKAN KRIMINAL

Rafli Muhammad Sabiq

Program Studi Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP Universitas Padjadjaran

E-mail: rafli19002@mail.unpad.ac.id

Nunung Nurwati

Departemen Kesejahteraan Sosial, FISIP Universitas Padjadjaran

E-mail: nngnurwati@yahoo.co.id

ABSTRAK

Jumlah masyarakat terus bertambah setiap harinya. Keturunan demi keturunan terlahir untuk menjadi penerus bagi generasi sebelumnya. Namun, kelahiran ini seringkali tidak terencana dengan baik dan menyebabkan terjadinya kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk ini dapat membawa pengaruh buruk bagi masyarakat jika tidak segera ditangani, salah satunya adalah meningkatnya kasus tindakan kriminal. Penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan pengaruh dari kepadatan penduduk yang dapat menyebabkan tindakan kriminal secara teoretis. Selanjutnya akan ditinjau lebih lanjut menggunakan teori-teori kependudukan yang ada dalam mengidentifikasi pengaruh-pengaruh kepadatan penduduk terhadap pemicu tindakan kriminal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepadatan penduduk memberikan pengaruh signifikan terhadap tindakan kriminal. Kepadatan penduduk mengakibatkan keterbatasan sumber-sumber pokok, keterbatasan lapangan pekerjaan, menghambat proses peningkatan kualitas masyarakat, dan persaingan antar penduduk yang pada akhirnya berujung pada tindakan kriminal.

Kata kunci: kepadatan penduduk, kriminal, kependudukan.

PENDAHULUAN

Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi seringkali menjadi penyebab terjadinya konflik. Handayani (2017) mengatakan bahwa masalah kemiskinan, pengangguran dan tekanan hidup dalam hal ini memberikan kontribusi terhadap terjadinya konflik sosial dan kriminalitas baik secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh tekanan penduduk. Jumlah penduduk yang semakin banyak dan tidak tersebar secara merata juga menjadi salah satu faktor terlahirnya konflik.

Mantra (dalam Audey dan Ariusni, 2017) menyebutkan bahwa kepadatan penduduk merupakan perbandingan masyarakat dengan daerah yang dihuninya. Perkembangan dan pembangunan yang pesat di suatu daerah memicu banyaknya penduduk yang pindah ke daerah tersebut.

Perpindahan atau migrasi tersebut dilakukan dengan harapan daerah yang dituju memiliki lapangan pekerjaan yang luas. Namun, pada kenyataannya lapangan pekerjaan yang ada tidak sebanding dengan banyaknya penduduk di daerah tersebut. Menurut Soerjani, dkk (dalam Fajri dan Rizki, 2019), kepadatan penduduk banyak memunculkan persoalan dalam menata ruang dampak dari tingginya tekanan penduduk terhadap lahan. Tingginya tingkat kelahiran merupakan penyumbang utama pertumbuhan penduduk yang pesat. Ledakan penduduk yang terjadi menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Irhamni, 2017).

Menurut Badan Pusat Statistik, tercatat bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 mencapai 266,91 juta jiwa. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah tersebut

terdiri dari 134 juta jiwa laki-laki dan 132 juta perempuan. Jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibanding jumlah penduduk usia tidak produktif, yaitu sebanyak 68% lebih dari total populasi. Penduduk dengan kelompok usia anak-anak mencapai 66,17 juta atau sekitar 24,8% dari total populasi. Lalu penduduk dengan kelompok usia produktif sebanyak 183,36 juta jiwa atau sekitar 68,7% dan kelompok usia tidak produktif sebanyak 17,37 juta jiwa atau sekitar 6,51% dari total populasi. Rasio ketergantungan atau *dependency ratio* dari penduduk Indonesia pada tahun 2019 mencapai 45,56%. Hal tersebut berarti setiap 100 orang usia produktif mempunyai tanggungan 46 orang usia tidak produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Semakin besar rasio ketergantungan tersebut menunjukkan semakin banyak beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai kehidupan penduduk usia tidak produktif.

Menurut Christiani, dkk (2014) tingginya kepadatan penduduk dapat menyebabkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kependudukan misalnya tingkat kemiskinan, kekurangan lapangan kerja, dan kriminalitas. Angka pengangguran yang terus meningkat di wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi sangat identik dengan tingginya tingkat kriminalitas (Fajri dan Rizki, 2019). Tingkat pertumbuhan penduduk yang begitu cepat mengakibatkan permintaan terhadap kebutuhan tenaga kerja menjadi terbatas. Permintaan terhadap kebutuhan tenaga kerja yang rendah ini membuat sebagian penduduk tidak memiliki pekerjaan dan memicu lahirnya tindakan kriminal.

Kriminalitas atau tindakan pidana merupakan suatu perbuatan maupun rangkaian perbuatan manusia yang berlawanan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku, dimana harus diadakan penghukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan (Bawengan dalam Audey dan Ariusni, 2017). Para ahli kriminologi berasumsi bahwa perilaku

menyimpang disebut sebagai kejahatan yang harus dijelaskan dengan melihat kondisi struktural dalam masyarakat dengan konteks ketidakmerataan kekuasaan, otoritas dan kemakmuran serta kaitannya dengan berbagai perubahan ekonomi dan politik yang ada di masyarakat (Santoso dalam Edwart dan Azhar, 2019).

Merujuk pada data dari Badan Pusat Statistik tentang angka kejahatan dan resiko terjadinya kejahatan pada penduduk, dapat diasumsikan bahwa jumlah penduduk yang banyak serta kepadatan penduduk yang tinggi akan berakibat dengan tingginya angka kejahatan. Todotua (2016) menyebutkan bahwa terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kriminalitas yaitu diantaranya kemiskinan, kepadatan penduduk, tingkat penyelesaian kasus, dan jumlah polisi. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah, maka semakin luas ruang gerak para pelaku tindakan kriminal karena semakin kecil kemungkinan tertangkapnya.

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh-pengaruh dari kepadatan penduduk yang dapat memicu tindakan kriminal. Artikel ini juga ditujukan untuk mengidentifikasi bagaimana kepadatan penduduk dapat memicu tindakan kriminal ditinjau dari teori-teori kependudukan yang diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan serta memberikan edukasi kepada masyarakat

METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode studi kepustakaan atau *literature review* dengan merujuk pada hasil pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen elektronik sebagai referensi yang mendukung penulisan artikel. Penulis mencoba meninjau berbagai teori kependudukan dan keterkaitannya dengan berbagai pemicu dari tindakan kriminal. Sumber yang digunakan sebagai referensi merupakan artikel-artikel dan tulisan ilmiah lainnya yang membahas tentang topik seputar kepadatan penduduk

di Indonesia, dampak dari kepadatan penduduk, penyebab kepadatan penduduk, tindakan kriminal di Indonesia, dampak dari tindakan kriminal, dan penyebab tindakan kriminal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Kependudukan

Pratama (2017) menyebutkan terdapat beberapa aliran teori-teori kependudukan sebagai berikut:

Aliran Malthusian (Thomas Robert Malthus)

Malthus merupakan orang pertama yang mengemukakan tentang penduduk. Dalam "*Essay on Population*", ia beranggapan bahwa bahan makanan penting untuk keberlangsungan hidup, nafsu manusia tidak tertahankan dan pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat dari pertumbuhan bahan makanan. Jumlah penduduk harus seimbang dengan batas ambang lingkungan, agar tidak menjadi beban lingkungan atau mengganggu daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dampak dari ketidakseimbangan ini dapat berupa bencana alam seperti banjir, kekeringan, gagal panen, kelaparan, wabah penyakit, dan kematian. Malthus berpendapat bahwa apabila tidak ada pembatasan penduduk (termasuk tumbuhan dan binatang) akan berkembang biak dengan sangat cepat dan memenuhi beberapa bagian dari permukaan bumi. Ia juga berpendapat bahwa hidup manusia memerlukan bahan makanan, sedangkan laju pertumbuhan makanan jauh lebih lambat dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk.

Aliran Marxist (Karl Marx & F. Angel)

Aliran ini tidak sependapat dengan Malthusian (bila tidak dibatasi penduduk akan kekurangan makanan). Menurut aliran Marxist tekanan penduduk di suatu negara bukanlah tekanan penduduk terhadap bahan makanan, tetapi tekanan terhadap lapangan kerja. Marxist berpendapat bahwa semakin banyak jumlah manusia maka semakin

banyak juga produk yang dihasilkan, dengan demikian tidak perlu diadakan pembatasan penduduk. Aliran ini berpendapat bahwa populasi manusia tidak menekan makanan, tetapi mempengaruhi kesempatan kerja. Menurutnya pemerataan bukan terjadi karena cepatnya pertumbuhan penduduk, tetapi karena kaum kapitalis yang telah mengambil sebagian hak para buruh. Semakin tingginya tingkat populasi manusia maka semakin tinggi pula produktivitasnya, jika teknologi tidak menggantikan tenaga manusia sehingga tidak perlu menekan jumlah kelahirannya.

Teori Kependudukan Kontemporer John Stuart Mill

John Stuart Mill menerima pendapat Malthus mengenai laju pertumbuhan penduduk yang melampaui laju pertumbuhan bahan makanan sebagai suatu aksioma. Namun dia juga berpendapat bahwa pada situasi tertentu manusia dapat mempengaruhi perilaku demografinya. Ia berpendapat jika produktivitas seorang tinggi ia cenderung ingin memiliki keluarga kecil. Dalam situasi seperti ini maka fertilitas menjadi rendah. Tidaklah benar bahwa kemiskinan tidak dapat dihindarkan seperti kata Malthus, atau kemiskinan itu disebabkan oleh sistem kapitalis seperti kata Marx, namun suatu waktu di suatu wilayah terjadi kekurangan bahan makanan, maka kejadian ini hanyalah bersifat sementara. Mill menyarankan untuk meningkatkan tingkat golongan yang tidak mampu. Dengan begitu mereka dapat mempertimbangkan perlu tidaknya menambah jumlah anak sesuai dengan karier dan usaha yang ada.

Teori Kependudukan Kontemporer Arsene Dumont

Pada tahun 1980 ia menulis sebuah artikel yang berjudul "*Depopulation et Civilization*". Ia adalah pelopor teori kapilaritas sosial (*theory of social capilarity*). Teori ini mengacu pada keinginan seseorang untuk mencapai kedudukan yang tinggi di

masyarakat. Untuk dapat mencapai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, keluarga yang besar merupakan perintang dan beban yang berat. Teori ini berkembang dengan baik pada negara-negara demokrasi, di mana tiap individu memiliki kebebasan dalam mencapai kedudukan yang tinggi di masyarakat. Tiap individu berlomba mencapai kedudukan yang tinggi dan menyebabkan angka kelahiran turun dengan cepat. Namun di negara sosialis yang tidak terdapat kebebasan untuk mencapai kedudukan tinggi di masyarakat, sistem kapilaritas sosial ini tidak berjalan dengan baik.

Teori Kependudukan Kontemporer Emile Durkheim

Durkheim menekankan perhatiannya pada keadaan akibat dari adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi. Ia berpendapat bahwa tingginya pertumbuhan penduduk dapat mengakibatkan timbulnya persaingan diantara penduduk untuk dapat mempertahankan hidup. Dalam memenangkan persaingan ini, tiap individu akan berusaha meningkatkan pendidikan, keterampilan, dan spesialisasi tertentu. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara kehidupan masyarakat tradisional dan masyarakat perkotaan. Pada masyarakat tradisional tidak terjadi persaingan dalam memperoleh pekerjaan, tetapi sebaliknya pada masyarakat perkotaan. Hal ini disebabkan masyarakat perkotaan dan industri mengalami tingkat pertumbuhan dan kepadatan penduduknya yang tinggi.

Hubungan Antara Kepadatan Penduduk Dan Tindakan Kriminal

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dona dan Setiawan (2015), variabel kepadatan penduduk (X_1), PDRB perkapita (X_2), tingkat pengangguran terbuka (X_3) dan indeks gini (X_8) berkorelasi positif artinya setiap terjadi peningkatan pada variabel-variabel tersebut terjadi peningkatan pula pada variabel tingkat kriminalitas (Y). diperoleh 2 variabel yang

berpengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas yaitu variabel kepadatan penduduk (X_1) dan persentase penduduk miskin (X_7). Peneliti menggunakan dua matriks pembobot yaitu *queen contiguity* (model SEM) dan *customize* (model SAR). Berdasarkan model SEM dapat dilihat bahwa (apabila faktor lain dianggap konstan) ketika kepadatan penduduk di suatu daerah meningkat sebesar 100 jiwa/ km^2 , dapat meningkatkan tingkat kriminalitas atau resiko penduduk menjadi korban kriminalitas sebanyak 2 korban per 1000 penduduk. Sedangkan berdasarkan model SAR dapat dilihat bahwa (apabila faktor lain dianggap konstan) ketika kepadatan penduduk di suatu daerah (X_1) bertambah 100 jiwa/ km^2 dapat meningkatkan resiko penduduk menjadi korban tindak kriminalitas sebanyak 2 korban per 100.000 penduduk.

Terdapat penelitian lain yang mendukung hasil penelitian Dona dan Setiawan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Handayani pada tahun 2017. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Handayani (2017), koefisien korelasi antara kepadatan penduduk dengan angka kriminalitas adalah sebesar 0,522 dengan nilai signifikansi (2-tailed) sebesar 0,082 < nilai $\alpha = 10\%$ sehingga dapat disimpulkan hubungan antara kepadatan pendudukan dengan angka kriminalitas adalah kuat (di atas nilai 0,500), dan berhubungan positif (jika kepadatan penduduk menaik, maka angka kriminalitas juga meningkat, demikian pula sebaliknya), dan hubungannya signifikan (nilai koefisien korelasi kurang dari nilai $\alpha = 10\%$). Dengan begitu, Handayani (2017) mengatakan bahwa dapat diperdiksi dengan semakin padat penduduk di suatu wilayah berpotensi meningkatkan kejadian kriminalitas.

Terakhir, terdapat penelitian lainnya yang mendukung hasil penelitian Dona dan Setiawan (2015) dan Handayani (2017), yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fajri dan Rizki pada tahun 2019. Fajri dan Rizki

(2019) mengatakan bahwa kepadatan penduduk yang tinggi menyebabkan banyak masalah, salah satunya adalah terbatasnya lapangan pekerjaan. Kondisi ini juga menyebabkan tingkat pengangguran semakin meningkat karena persaingan dunia kerja yang ketat. Hasil penelitian Fajri dan Rizki menunjukkan bahwa variabel *density* atau kepadatan penduduk memiliki nilai koefisien regresi 0.462479 dan hasil probabilitas sebesar $0.0003 < 0,05$ yang artinya variabel kepadatan penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kriminalitas. Dengan begitu, semakin tinggi kepadatan penduduk maka kriminalitas akan ikut meningkat.

Dampak Kepadatan Penduduk Yang Memicu Tindakan Kriminal

Edwart dan Azhar (2019) mengatakan bahwa jumlah kepadatan penduduk merupakan salah satu faktor yang memicu tindakan kriminal karena daerah dengan penduduk yang padat cenderung mengalami permasalahan ekonomi, kesejahteraan, kebutuhan pangan serta kurangnya tingkat keamanan yang berujung pada tindakan kriminal. Jumlah penduduk yang semakin banyak di suatu daerah akan berakibat pada lapangan kerja yang semakin sedikit dan nantinya menyebabkan pengangguran serta ketimpangan pendapatan antara tenaga kerja yang bekerja dan tidak bekerja, akhirnya hal seperti ini yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal.

Selain itu, dampak dari kepadatan penduduk yang dapat memicu terjadinya tindakan kriminal dapat ditinjau lebih lanjut berdasarkan teori-teori kependudukan yang sudah diuraikan sebelumnya. Menurut teori kependudukan Thomas Robert Malthus, pertumbuhan penduduk harus seimbang dengan pertumbuhan bahan makanan. Ia berpendapat bahwa laju pertumbuhan makanan jauh lebih lambat dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk. Hal ini didukung oleh Christiani, dkk (2014) yang menyebutkan bahwa ledakan penduduk

yang cepat dapat menyebabkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat terutama dalam bidang sosial dan ekonomi. Kepadatan penduduk dapat menyebabkan terbatasnya sumber-sumber kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan yang layak) sehingga sumber-sumber kebutuhan pokok tersebut tidak sebanding dengan jumlah penduduk. Ketidakseimbangan tersebut akhirnya membuat sebagian penduduk tidak mendapatkan sumber-sumber pokok yang layak dan memicu sebagian penduduk untuk memenuhi kebutuhannya dengan melakukan tindakan kriminal.

Teori selanjutnya adalah teori kependudukan Karl Marx dan F. Angel. Mereka tidak sependapat dengan Malthus dan menyebutkan bahwa kepadatan penduduk menjadi tekanan terhadap lapangan pekerjaan, bukan tekanan terhadap bahan makanan. Teori Marx juga didukung oleh Christiani, dkk (2014) yang menyebutkan bahwa kepadatan penduduk menyebabkan tidak tercukupinya lapangan pekerjaan bagi para tenaga kerja yang tersedia. Lapangan pekerjaan yang sedikit ini akhirnya menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah pengangguran dan berdampak pula pada menurunnya kualitas sosial. Penurunan kualitas sosial yang dimaksud adalah banyaknya tuna wisma, jumlah pengemis, kriminalitas yang meningkat, dan lainnya. Handayani (2017) menyebutkan bahwa lapangan pekerjaan yang semakin menurun akan meningkatkan jumlah pengangguran, sehingga timbul berbagai macam aksi kriminalitas. Dengan begitu, sudah jelas bahwa kepadatan penduduk menyebabkan tingkat pengangguran yang tinggi dan sejalan dengan tingkat kriminalitas.

Fajri dan Rizki (2019) mengatakan bahwa kepadatan penduduk yang tinggi dapat menghambat usaha peningkatan kualitas penduduknya. Hal ini berhubungan dengan teori kependudukan kontemporer John Stuart Mill yang menyarankan untuk meningkatkan tingkat golongan yang tidak mampu (pekerjaan, kesehatan, pendidikan, pendapatan). Seperti yang kita ketahui

bahwa kepadatan penduduk memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kriminalitas terutama pada daerah yang diikuti dengan peningkatan kemiskinan. Kepadatan penduduk dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah untuk mengatur populasi semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini mengakibatkan banyak dari penduduk yang terabaikan dan luput dari pengawasan pemerintah yang apada akhirnya memicu kenaikan tindakan kriminalitas (Handayani, 2017). Kepadatan penduduk juga menyebabkan fasilitas sosial dan kesehatan (sekolah, rumah sakit, tempat rekreasi) serta fasilitas pendukung kehidupan lainnya tidak tercukupi (Christiani, dkk, 2014). Sebagian penduduk yang tidak mendapat fasilitas tersebut akhirnya mencari cara lain agar mendapat fasilitas yang sama, yaitu dengan melakukan tindakan kriminal.

Terakhir, terdapat teori kependudukan kontemporer Arsene Dumont dan teori Emile Durkheim. Dumont mengacu pada keinginan seseorang untuk mencapai kedudukan yang tinggi di masyarakat. Sedangkan Durkheim mengacu pada timbulnya persaingan diantara penduduk untuk dapat mempertahankan hidup. Kedua teori ini dapat mengacu pada satu hal yang sama, yaitu persaingan antar penduduk. Meningkatnya jumlah penduduk yang digambarkan dengan kepadatan penduduk dapat mengakibatkan persaingan yang semakin meningkat antar penduduk dengan penduduk lainnya (Handayani, 2017). Durkheim mengatakan masyarakat akan berusaha meningkatkan pendidikan, keterampilan, dan spesialisasi tertentu untuk memenangkan persaingan ini. Namun, kepadatan penduduk menyebabkan tidak semua masyarakat dapat mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas dirinya karena keterbatasan fasilitas. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat mencari jalan pintas agar dapat memenangkan persaingan ini, yaitu salah satunya dengan melakukan tindakan kriminal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepadatan penduduk memiliki pengaruh dan dapat memicu terjadinya tindakan kriminal. Terdapat berbagai teori kependudukan yang dapat digunakan dalam meninjau dampak kepadatan penduduk terhadap tindakan kriminal. Berdasarkan teori kependudukan Thomas Robert Malthus, kepadatan penduduk dapat menyebabkan sebagian penduduk kesulitan mendapatkan sumber-sumber pokok yang layak, sehingga sebagian penduduk melakukan tindakan kriminal demi memenuhi kebutuhannya. Teori Marx secara jelas menunjukkan bahwa kepadatan penduduk dapat menyebabkan keterbatasannya lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang terbatas akhirnya menyebabkan tingginya tingkat pengangguran yang sejalan dengan tingkat kriminalitas. Selain itu, teori John Stuart Mill menjelaskan bahwa kepadatan penduduk menjadi salah satu penghambat dalam proses peningkatan kualitas masyarakat. Oleh karena itu, sebagian masyarakat mencari cara lain untuk meningkatkan kualitas dirinya dengan melakukan tindakan kriminal. Terakhir, teori Dumont dan Durkheim yang mengacu pada persaingan antar penduduk dalam mempertahankan hidup. Kepadatan penduduk membuat persaingan semakin ketat dan meningkat. Persaingan ini akhirnya mengakibatkan sebagian masyarakat melakukan cara lain untuk tetap memenangkannya yaitu dengan melakukan tindakan kriminal.

Saran

Berdasarkan tulisan di atas, penulis memberi saran kepada pemerintah untuk dapat melakukan pemerataan pembangunan dan menyediakan lapangan pekerjaan di setiap wilayah agar kepadatan penduduk tidak terkonsentrasi pada suatu wilayah saja dan sebagai langkah antisipasi peningkatan tindakan kriminal. Penulis juga

menyarankan untuk masyarakat diharapkan mampu membantu pemerataan sumber daya dan pembangunan di setiap wilayah, menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan baru terutama di wilayah padat penduduk, dan mengurangi kegiatan migrasi agar tidak terjadi ledakan penduduk di suatu wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, R. (2019). Pengaruh Ketimpangan Ekonomi, Pengangguran dan Kepadatan Penduduk terhadap Tingkat Kriminalitas di Indonesia [Skripsi]. Padang (ID): Universitas Andalas.
- Audey, R. P., & Ariusni. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Tingkat Kriminalitas di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(2), 653–666.
- BPS. (2018). Statistik Indonesia (Statistical Yearbook of Indonesia) 2018. *Badan Pusat Statistik*, 1–719.
- BPS. (2019). Statistik Kriminal 2019. *Badan Pusat Statistik*, 1–218.
- Christiani, C., Tedjo, P., & Martono, B. (2014). Analisis Dampak Kepadatan Penduduk terhadap Kualitas Hidup Masyarakat Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 102–114.
- Dona, F. M., & Setiawan. (2015). Pemodelan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas di Jawa Timur dengan Analisis Regresi Spasial. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 4(1), D73–D78.
- Edwart, A. O., & Azhar, Z. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kepadatan Penduduk dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kriminalitas di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(3), 759–768.
- Fajri, R. E., & Rizki, C. Z. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kepadatan Penduduk dan Pengangguran terhadap Kriminalitas Perkotaan Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 4(3), 255–263.
- Handayani, R. (2017). Analisis Dampak Kependudukan terhadap Tingkat Kriminalitas di Provinsi Banten. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 149–169.
- Irhamni. (2017). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 1986-2015 [Skripsi]. Yogyakarta (ID): Universitas Negeri Yogyakarta.
- Pasiza, R., Nugroho, S., & Faisal, F. (2015). *Analisis Jalur Faktor-Faktor Penyebab Kriminalitas di Indonesia*.
- Pratama, A. (2017). Analisis Tingkat Pertumbuhan Penduduk terhadap Harga Tanah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kecamatan Jati Agung) [Skripsi]. Lampung (ID): UIN Raden Intan Lampung.
- Simamora, P. A., & Ratnasari, V. (2014). Pemodelan Persentase Kriminalitas dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi di Jawa Timur dengan Pendekatan Geographically Weighted Regression (GWR). *Jurnal Sains Dan Seni POMITS*, 3(1), D18–D23.
- Tamara, M. A., & Kurniawan, A. (2018). Pola Spasial Kejadian Kejahatan Jalanan (Street Crime) Berdasarkan Faktor Ekologi Kriminal di Kota Samarinda. *Jurnal Bumi Indonesia*, 7(4).
- Todotua, D. S. (2016). Pengaruh Kemiskinan, Kepadatan Penduduk, Tingkat Penyelesaian Kasus, dan Jumlah Polisi Terhadap Tingkat Kejahatan Properti DKI Jakarta (2006-2013) [Skripsi]. Semarang (ID): Universitas Diponegoro.